

**PERAN STATISTIK DALAM MENGUKUR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

Shakila Zain Siregar¹, Tantri Putrida², Ronaldo Sianipar³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

Email: shakilazain.7142510009@mhs.unimed.ac.id¹,

tantriputri.7243510015@mhs.unimed.ac.id², ronaldosianipar837@gmail.com³

Abstrak: Artikel ini menganalisis peran statistik dalam mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Statistik digunakan untuk memperoleh gambaran akurat mengenai jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya dibandingkan dengan total angkatan kerja. Melalui metode survei tenaga kerja dan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik, artikel ini bertujuan mengidentifikasi tren pengangguran, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Tingkat pengangguran terbuka, serta implikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2021, tingkat pengangguran mengalami penurunan berkat pemulihan ekonomi, peningkatan investasi, program pelatihan tenaga kerja, serta pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menekan angka pengangguran melalui kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna mencapai stabilitas ketenagakerjaan yang berkelanjutan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Data, Statistik, Pengangguran, Sumatera Utara.

Abstract: This article analyzes the role of statistics in measuring the Open Unemployment Rate in North Sumatra Province in 2024. Statistics are used to obtain an accurate picture of the number of people who are actively looking for work but have not found it compared to the total workforce. Through the method of labor survey and secondary data analysis from the Central Statistics Agency, this article aims to identify unemployment trends, factors that influence changes in the Open Unemployment Rate, and policy implications that can be applied to reduce unemployment. The results of the study show that since 2021, the unemployment rate has decreased thanks to economic recovery, increased investment, workforce training programs, and the growth of the micro, small, and medium business sector. The government has an important role in reducing unemployment through policies that support job creation and improving workforce skills. Therefore, synergy between the government, the business world, and the community is very much

needed to achieve sustainable employment stability, and realize the vision of Golden Indonesia 2045.

Keywords: *Data, Statistics, Unemployment, North Sumatra*

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Sukirno (2000) mengemukakan bahwa pengukuran pengangguran sangat penting karena memberikan informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial yang tepat. Dengan data yang akurat tentang pengangguran, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, pengukuran pengangguran juga memberikan gambaran mengenai keseimbangan pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu negara atau daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran statistik dalam mengukur tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Dengan menggunakan metode statistik yang tepat, seperti survei angkatan kerja dan pengolahan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini berfokus pada identifikasi tren pengangguran, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat pengangguran, serta implikasi kebijakan ekonomi yang dapat diambil berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan alat analisis statistik dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi pengangguran terbuka di Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana data pengangguran yang terukur secara statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan di Sumatera Utara dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Secara lebih luas, artikel ini juga menunjukkan bagaimana statistik memiliki peran sentral dalam analisis masalah ekonomi dan perencanaan pembangunan regional yang lebih terarah dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis peran statistik dalam mengukur tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena pengangguran di provinsi tersebut, dengan menggabungkan teori-teori yang relevan dari literatur dan data statistik yang diperoleh dari sumber resmi.

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seluruh warga negara Indonesia, dengan sampel yang diambil khusus dari Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Pemilihan Provinsi Sumatera Utara sebagai sampel didasarkan pada relevansi dan karakteristik sosial ekonomi yang beragam, yang dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi pengangguran di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangguran dan statistik. Penulis merujuk pada literatur yang relevan untuk membangun dasar teori dan kerangka konseptual, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Analisis dilakukan secara deskriptif dan sintesis untuk memahami teori-teori yang ada dan metodologi yang digunakan dalam mengukur pengangguran.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Data ini mencakup indikator-indikator penting yang relevan, seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengangguran. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi pengangguran di provinsi tersebut. Selain itu, dilakukan juga analisis tren untuk melihat pola perubahan tingkat pengangguran dari waktu ke waktu dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu literatur dan data sekunder dari BPS. Literatur yang digunakan mencakup berbagai buku dan jurnal ilmiah yang memberikan wawasan teoritis tentang pengangguran dan statistik, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari BPS memberikan informasi empirik yang dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut.

Dengan pendekatan campuran ini, penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 secara lebih akurat dan menyeluruh, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran statistik dalam mengukur fenomena tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang kondisi pasar tenaga kerja di provinsi tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Statistik

Statistik dapat dipahami dalam dua pengertian utama, yaitu statistik sebagai data dan statistik sebagai metode. Sebagai data, statistik merujuk pada kumpulan informasi kuantitatif yang disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau ringkasan numerik lainnya. Dalam konteks ketenagakerjaan, ini mencakup data tentang jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan berbagai indikator ketenagakerjaan lainnya.

Sebagai metode, statistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Prof. Muhammad Arif dalam bukunya "Dasar-dasar Statistika" (2020: 3-5) mendefinisikan statistik sebagai "ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan berdasarkan data tersebut."

Dr. Siti Rahmah dari Institut Statistik Nasional dalam publikasinya "Statistik untuk Kebijakan Publik" (2022: 12) menjelaskan bahwa "statistik merupakan alat yang memungkinkan pengambil kebijakan mentransformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk dasar pengambilan keputusan."

Ruang Lingkup Statistik dalam Analisis Ketenagakerjaan

1. Statistik Deskriptif

Metode untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik utama data ketenagakerjaan. Ini meliputi ukuran pemusatan (rata-rata, median, modus), ukuran penyebaran (rentang, varians, deviasi standar), dan distribusi frekuensi. Dalam analisis pengangguran, statistik deskriptif

digunakan untuk menggambarkan profil demografis pengangguran, distribusi geografis, dan tren temporal.

2. Statistik Inferensial

Metode untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Dalam konteks survei ketenagakerjaan, teknik sampling dan estimasi digunakan untuk menghasilkan data yang representatif tentang kondisi ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Estimasi interval kepercayaan digunakan untuk menunjukkan tingkat presisi pengukuran tingkat pengangguran.

3. Statistik Multivariat

Teknik analisis yang melibatkan beberapa variabel secara simultan. Dalam studi ketenagakerjaan, analisis regresi multivariat digunakan untuk mengidentifikasi determinan pengangguran, sementara analisis cluster membantu dalam mengidentifikasi kelompok dengan karakteristik pengangguran yang serupa.

Prof. Bambang Widjanarko dalam bukunya "Statistik Ekonomi dan Ketenagakerjaan" (2021: 45-47) menyatakan, "Statistik dalam konteks ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai alat deskripsi, tetapi juga sebagai instrumen analitik untuk mengungkap relasi kausal dan pola tersembunyi dalam dinamika pasar kerja."

Prinsip-prinsip Statistik dalam Pengukuran Pengangguran

Pengukuran pengangguran terbuka dengan metode statistik yang valid harus mengikuti beberapa prinsip dasar. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut:

1. Validitas

Validitas merujuk pada sejauh mana suatu metode statistik benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks pengangguran terbuka, validitas berarti bahwa definisi operasional yang digunakan dalam pengumpulan data harus secara akurat mencerminkan konsep teoretis pengangguran terbuka.

Prof. Rahmad Suhandi dari Institut Statistik Indonesia dalam bukunya "Validitas dan Keandalan Pengukuran Statistik" (2021: 56-58) menyatakan : "Validitas pengukuran pengangguran tergantung pada seberapa baik definisi operasional menangkap kompleksitas situasi

ketenagakerjaan kontemporer. Transformasi bentuk-bentuk pekerjaan, seperti munculnya gig economy dan pekerjaan digital, menuntut pembaruan definisi operasional secara berkala.

Contoh konkret dari prinsip validitas dalam pengukuran pengangguran terbuka di Sumatera Utara adalah revisi yang dilakukan BPS terhadap instrumen survei Sakernas pada tahun 2022. Revisi ini mencakup penambahan pertanyaan tentang pekerjaan berbasis aplikasi dan pekerjaan jarak jauh untuk memastikan bahwa perubahan struktur pasar kerja tercermin dengan tepat dalam statistik pengangguran.

Dr. Amalia Puspitasari, ahli ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, dalam jurnal "Validitas Pengukuran Ketenagakerjaan di Era Digital" (2023) menjelaskan: "Pengukuran yang valid untuk pengangguran di era ekonomi digital harus mampu membedakan antara mereka yang benar-benar tidak bekerja dengan mereka yang terlibat dalam pekerjaan tidak tetap atau pekerjaan digital yang sering tidak terdeteksi oleh instrumen survei konvensional. Di Sumatera Utara, di mana penetrasi ekonomi digital berkembang pesat, hal ini menjadi tantangan tersendiri."

2. Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran ketika diulang dalam kondisi yang sama. Pengukuran pengangguran yang reliabel akan menghasilkan estimasi yang sama atau sangat mirip jika dilakukan berulang kali dengan metodologi yang sama dan dalam populasi yang sama.

Prof. Budi Santoso dari Universitas Gadjah Mada dalam bukunya "Metode Statistik Lanjutan" (2020:124-126) menjelaskan: "Reliabilitas pengukuran statistik ketenagakerjaan bergantung pada tiga faktor utama: standardisasi instrumen survei, pelatihan petugas lapangan, dan pengendalian kualitas dalam seluruh proses pengumpulan data. Tanpa ketiga hal ini, variasi dalam hasil yang seharusnya konsisten akan muncul."

Di Provinsi Sumatera Utara, BPS menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan reliabilitas survei ketenagakerjaan, antara lain:

1. Pelatihan intensif bagi enumerator sebelum pelaksanaan Sakernas
2. Penggunaan kuesioner elektronik yang terstandarisasi
3. Supervisi berlapis dalam proses pengumpulan data
4. Validasi silang dengan sumber data administratif

Dr. Mariati Sinaga, statistisi dari BPS Sumatera Utara, dalam presentasinya pada Seminar Ketenagakerjaan Regional (2023) mengungkapkan: "Untuk memastikan reliabilitas pengukuran pengangguran terbuka, kami melakukan uji-uji statistik seperti test-retest dan inter-rater reliability. Hasil menunjukkan koefisien Cronbach's Alpha 0.87 untuk instrumen Sakernas di Sumatera Utara, yang mengindikasikan tingkat reliabilitas yang tinggi."

Prof. Taufik Rahman dari Institut Teknologi Bandung menambahkan dalam bukunya "Statistika: Teori dan Aplikasi" (2022: 213): "Reliabilitas bukan hanya masalah teknis pengukuran, tetapi juga masalah konseptual. Stabilitas konsep pengangguran itu sendiri dalam konteks sosial-ekonomi yang berubah cepat menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan reliabilitas pengukuran dari waktu ke waktu."

3. Representativitas

Representativitas berkaitan dengan sejauh mana sampel yang digunakan dalam survei mencerminkan karakteristik populasi target. Dalam konteks survei ketenagakerjaan, sampel harus mewakili seluruh angkatan kerja di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan keragaman geografis, demografis, dan sosial-ekonomi.

Prof. Dra. Nurhayati, Ph.D. dari Universitas Sumatera Utara dalam bukunya "Sampling dalam Penelitian Sosial" (2021: 89-92) menekankan: "Representativitas sampel dalam survei ketenagakerjaan mensyaratkan stratifikasi yang tepat berdasarkan karakteristik-karakteristik yang berkorelasi dengan pola ketenagakerjaan, seperti urbanitas, struktur ekonomi wilayah, dan komposisi demografis. Di Sumatera Utara dengan keragaman geografisnya yang tinggi, dari wilayah metropolitan Medan hingga pedesaan di Tapanuli, stratifikasi menjadi krusial untuk memastikan representativitas."

Dalam praktiknya, BPS Sumatera Utara menerapkan desain sampling kompleks untuk Sakernas dengan beberapa karakteristik:

1. Stratifikasi wilayah berdasarkan klasifikasi urban-rural
2. Pengelompokan berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi
3. Alokasi sampel proporsional terhadap ukuran populasi
4. Oversampling untuk wilayah dengan keragaman tinggi

Dr. Surya Dharma, ahli metodologi survei dari Universitas Negeri Medan, dalam jurnalnya "Evaluasi Desain Sampling Survei Ketenagakerjaan" (2022) menjelaskan: "Analisis yang kami lakukan terhadap desain sampling Sakernas di Sumatera Utara menunjukkan bahwa dengan confidence level 95%, margin of error berada pada rentang 2,3%-3,1%, yang menandakan tingkat representativitas yang memadai untuk perencanaan kebijakan. Namun, untuk beberapa subpopulasi spesifik seperti pekerja informal di wilayah terpencil, representativitas masih perlu ditingkatkan."

Prof. Hermanto Siregar dari Institut Pertanian Bogor menambahkan dalam bukunya "Ekonometrika Survei" (2023: 156): "Representativitas bukan hanya masalah teknis sampling, tetapi juga masalah aksesibilitas. Di wilayah-wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti beberapa bagian Sumatera Utara, bias non-respon dapat mengancam representativitas meskipun desain sampling sudah optimal secara teoretis."

4. Objektivitas

Objektivitas dalam pengukuran statistik berarti bahwa proses pengumpulan dan analisis data harus bebas dari bias subjektif pengumpul data maupun analis. Hasil pengukuran seharusnya tidak terpengaruh oleh preferensi, ekspektasi, atau prasangka pihak-pihak yang terlibat dalam proses statistik.

Dr. Faisal Basri, ekonom dari Universitas Indonesia, dalam bukunya "Bias dan Objektivitas dalam Statistik Ekonomi" (2020: 167-170) menyatakan: "Objektivitas dalam statistik ketenagakerjaan menghadapi tantangan dari dua arah: bias politik yang mungkin mendorong underestimation atau overestimation angka pengangguran, dan bias metodologis yang muncul dari asumsi-asumsi implisit dalam desain survei. Keduanya harus dimitigasi melalui sistem keseimbangan dan pengawasan yang ketat."

BPS Sumatera Utara menerapkan beberapa strategi untuk memastikan objektivitas dalam pengukuran pengangguran terbuka:

1. Protokol wawancara terstandarisasi untuk mengurangi bias pewawancara
2. Pelatihan yang menekankan netralitas dan objektivitas bagi enumerator
3. Penggunaan teknologi computer-assisted personal interviewing (CAPI) yang mengurangi ruang interpretasi subjektif

4. Pemisahan antara pengumpul data dan analis untuk menciptakan mekanisme checks and balances

Prof. Widjajanti Isdijoso dari SMERU Research Institute dalam presentasinya pada Konferensi Statistik Nasional (2022) menekankan: "Dalam konteks pengukuran pengangguran, objektivitas harus dipahami sebagai konsep yang dinamis. Ini bukan hanya tentang menghindari bias dalam pengumpulan data, tetapi juga tentang mengakui keterbatasan definisi dan metodologi yang digunakan, serta transparan tentang margin of error dan ketidakpastian dalam estimasi."

Dr. Ahmad Syafii Ma'arif, sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menambahkan dalam bukunya "Kritis terhadap Statistik" (2021: 78): "Objektivitas dalam pengukuran fenomena sosial seperti pengangguran selalu berada dalam ketegangan dengan konteks sosial-budaya. Di Sumatera Utara dengan keragaman etnis dan kulturalnya, persepsi tentang 'bekerja' dan 'menganggur' bisa sangat bervariasi. Statistisi perlu mengakui bahwa objektivitas absolut tidak mungkin dicapai, namun harus tetap diupayakan melalui metodologi yang ketat."

5. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan mengenai seluruh aspek proses statistik, dari desain survei hingga analisis dan pelaporan hasil. Metodologi statistik harus didokumentasikan dengan jelas sehingga dapat dipahami dan direplikasi oleh pihak lain.

Prof. Firmanzah, Ph.D., ekonom dari Universitas Indonesia, dalam bukunya "Transparansi Data untuk Kebijakan Publik" (2022: 209-212) menyatakan "Transparansi statistik ketenagakerjaan tidak hanya penting untuk integritas ilmiah, tetapi juga untuk legitimasi kebijakan yang didasarkan pada statistik tersebut. Di era post-truth, kepercayaan publik terhadap statistik resmi semakin bergantung pada transparansi proses dan kejujuran tentang keterbatasan data."

BPS Indonesia termasuk BPS Sumatera Utara telah mengadopsi beberapa praktik untuk meningkatkan transparansi:

1. Publikasi metadata yang komprehensif untuk setiap survei ketenagakerjaan
2. Penerbitan mikrodata yang telah dianonimkan untuk analisis independen
3. Dokumentasi perubahan metodologi dan dampaknya terhadap komparabilitas data
4. Forum dialog reguler dengan akademisi dan pengguna data

Dr. Yenny Susilowati, Kepala BPS Sumatera Utara periode 2020-2023, dalam wawancara dengan Jurnal Ekonomi Kerakyatan (2022) menekankan: "Kami berkomitmen pada transparansi penuh dalam proses statistik. Semua perubahan metodologi dalam pengukuran pengangguran didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada publik. Kami juga menerbitkan confidence interval dari estimasi untuk mengakui ketidakpastian statistik."

Prof. Dr. Didik J. Rachbini dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan menambahkan dalam bukunya "Politik dan Statistik" (2023: 145): "Transparansi statistik ketenagakerjaan tidak hanya tentang metodologi teknis, tetapi juga tentang kejujuran dalam mengomunikasikan keterbatasan data dan potensi bias. Di tingkat daerah seperti Sumatera Utara, transparansi juga mencakup keterbukaan tentang kendala sumber daya dan infrastruktur yang mungkin mempengaruhi kualitas data."

Prof. Arifin Sitorus dari Universitas Sumatera Utara dalam publikasinya "Prinsip dan Aplikasi Statistika" (2023: 78-82) merangkum hubungan antara kelima prinsip tersebut: "Kelima prinsip statistik—validitas, reliabilitas, representativitas, objektivitas, dan transparansi—bukan prinsip yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling menguatkan. Validitas tidak mungkin dicapai tanpa reliabilitas, representativitas memerlukan objektivitas dalam seleksi sampel, dan kesemuanya perlu didukung oleh transparansi agar dapat dipercaya. Dalam konteks pengukuran pengangguran di Sumatera Utara dengan kompleksitas geografis dan sosial-ekonominya yang tinggi, penerapan simultan kelima prinsip ini menjadi lebih menantang sekaligus lebih penting."

Dr. Gunawan Wicaksono, statistisi senior dari World Bank Indonesia, dalam seminar "Kualitas Statistik untuk Pembangunan Inklusif" (2023) memperkuat pendapat ini: "Pengalaman global menunjukkan bahwa lemahnya salah satu dari lima prinsip dasar statistik ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, peningkatan kapasitas institusi statistik dalam menerapkan kelima prinsip secara simultan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kebijakan pengurangan pengangguran didasarkan pada fondasi empiris yang kokoh."

Gambaran Umum Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan karakteristik ketenagakerjaan yang kompleks. Berdasarkan data BPS, struktur ketenagakerjaan di provinsi ini menunjukkan keragaman baik dari segi sektoral maupun geografis.

Sebagai ilustrasi, data historis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak transformasi struktural ekonomi dan perubahan demografis.

Pengertian Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik, Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Pengangguran juga mencakup mereka yang sudah diterima untuk bekerja atau sudah siap memulai usaha, tetapi belum mulai bekerja atau berusaha. Selain itu, pengangguran juga meliputi individu yang merasa putus asa dan tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pengangguran, salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja, yang menunjukkan sejauh mana tenaga kerja yang ada di suatu wilayah atau negara tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan kata lain, TPT mencerminkan ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, serta menjadi indikator penting dalam menganalisis kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja suatu negara atau daerah.

Faktor yang Memengaruhi Terciptanya Pengangguran Terbuka

Terciptanya pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan struktural. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi terciptanya pengangguran terbuka di Sumatera Utara:

1. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah keterampilan dan tingkat pendidikan. Di Sumatera Utara, banyak angkatan kerja yang memiliki

tingkat pendidikan rendah, sehingga kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia membutuhkan keterampilan teknis atau pendidikan yang lebih tinggi, sementara sebagian besar pengangguran di Sumatera Utara adalah lulusan sekolah menengah atau bahkan yang tidak berpendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara ("Profil Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara 2023"), banyak pekerja yang menganggur memiliki pendidikan di bawah SMA, sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat

Pertumbuhan ekonomi yang rendah atau tidak merata di Sumatera Utara menjadi faktor utama dalam tingginya tingkat pengangguran. Ketika ekonomi suatu daerah tumbuh lambat, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk menampung seluruh angkatan kerja. Menurut laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2023 tercatat melambat akibat faktor-faktor eksternal dan terbatasnya sektor yang berkembang pesat. Hal ini mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja, terutama bagi angkatan kerja yang baru memasuki pasar tenaga kerja.

3. Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktural dalam perekonomian Sumatera Utara, seperti peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, juga berperan dalam tingginya pengangguran terbuka. Banyak tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor informal yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di sektor industri atau jasa yang berkembang lebih pesat. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Utara ("Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2023"), sektor-sektor yang berkembang pesat seperti industri manufaktur dan pariwisata memerlukan tenaga kerja yang lebih terampil, sementara banyak tenaga kerja di Sumatera Utara masih bergantung pada sektor pertanian yang lebih rendah produktivitasnya.

4. Kurangnya Infrastruktur dan Investasi

Infrastruktur yang kurang berkembang di beberapa daerah di Sumatera Utara dapat menjadi penghambat bagi investasi, yang pada gilirannya memengaruhi terciptanya lapangan pekerjaan

baru. Banyak wilayah di luar kota-kota besar di Sumatera Utara yang memiliki infrastruktur terbatas, sehingga kesulitan dalam menarik investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Menurut laporan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ("Rencana Pembangunan Daerah 2023"), beberapa daerah di Sumatera Utara mengalami kesulitan dalam menarik investasi karena minimnya aksesibilitas dan infrastruktur yang belum memadai, sehingga potensi pengembangan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja seperti industri atau pariwisata terbatas.

5. Faktor Musiman

Faktor musiman juga memengaruhi tingkat pengangguran di Sumatera Utara, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Banyak pekerjaan yang bergantung pada musim tertentu, seperti dalam sektor pertanian (panen dan musim tanam) dan sektor pariwisata (musim liburan). Berdasarkan data BPS ("Analisis Ketenagakerjaan di Sektor Pertanian dan Pariwisata di Sumatera Utara"), sektor pertanian di Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh musim, di mana selama musim tanam atau panen, permintaan tenaga kerja meningkat, tetapi saat musim tersebut berakhir, banyak pekerja yang kembali menganggur.

6. Demografi dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja yang lebih besar. Menurut BPS Sumatera Utara ("Demografi Provinsi Sumatera Utara 2023"), angka pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah pencari kerja meningkat, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak selalu bertambah secara signifikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini menambah jumlah angkatan kerja yang lebih muda, namun tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung mereka.

7. Tingkat Kewirausahaan yang Rendah

Kewirausahaan yang rendah juga menjadi faktor penting dalam tingginya pengangguran di Sumatera Utara. Banyak individu yang lebih memilih mencari pekerjaan di perusahaan atau sektor formal, daripada membuka usaha sendiri. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM ("Laporan Kewirausahaan di Sumatera Utara"), rendahnya tingkat kewirausahaan ini disebabkan oleh kurangnya dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) dan terbatasnya akses terhadap

modal atau pelatihan kewirausahaan, sehingga banyak orang yang tidak tergerak untuk berwirausaha meskipun terdapat peluang untuk membuka usaha.

8. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Meskipun ada berbagai program pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, implementasi yang tidak optimal atau tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pengangguran terus meningkat. Menurut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ("Evaluasi Program Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara 2023"), meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru, namun belum sepenuhnya mampu mengurangi pengangguran karena belum merata implementasinya di seluruh wilayah.

Peran Statistik dalam Mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka

Statistik memainkan peran penting dalam mengukur dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka. Dalam konteks ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung sebagai persentase dari jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya terhadap total angkatan kerja. Untuk memperoleh angka ini, digunakan metode statistik yang mencakup pengumpulan data melalui survei tenaga kerja, seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. Survei ini menggunakan pendekatan sampling, di mana sejumlah sampel penduduk dipilih secara acak untuk mewakili kondisi ketenagakerjaan secara nasional.

Selain itu, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola perubahan pengangguran dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat dalam kurva yang telah dibuat. Dengan statistik deskriptif, kita bisa menghitung rata-rata (mean), median, dan variabilitas tingkat pengangguran dari waktu ke waktu. Misalnya, jika kita menghitung rata-rata TPT selama periode 2019-2024, kita dapat mengetahui seberapa besar fluktuasi yang terjadi dalam jangka waktu tersebut. Selain itu, deviasi standar dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan TPT dari tahun ke tahun, memberikan gambaran tentang stabilitas atau volatilitas pasar tenaga kerja.

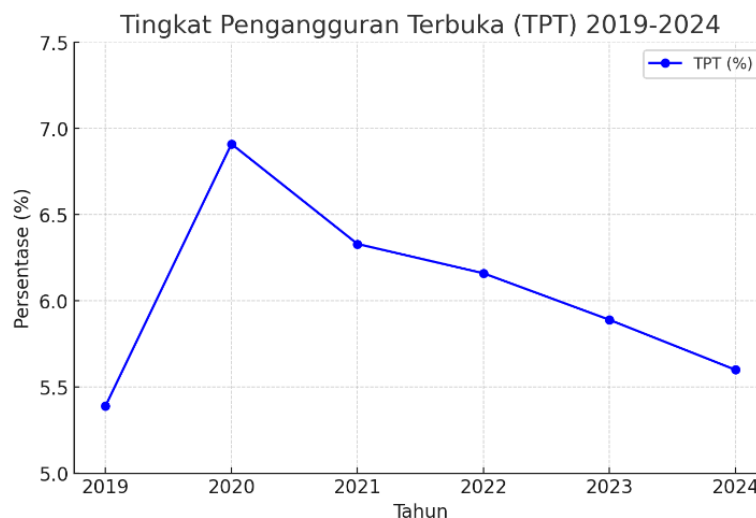
Selain statistik deskriptif, statistik inferensial juga berperan penting dalam menganalisis pengangguran terbuka. Analisis regresi linier, misalnya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi

hubungan antara tingkat pengangguran dengan faktor ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi, tingkat investasi, atau kebijakan ketenagakerjaan. Jika ditemukan korelasi yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, maka dapat dibuat prediksi tentang bagaimana perubahan ekonomi di masa depan akan mempengaruhi tingkat pengangguran.

Selain itu, statistik juga digunakan dalam pengukuran penyebab pengangguran berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan wilayah tempat tinggal. Dari tabel yang digunakan dalam grafik ini, terlihat bahwa tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Ini bisa dijelaskan dengan adanya persaingan kerja yang lebih ketat di kota, serta banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di sektor formal. Di sisi lain, pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah kejuruan. Hal ini mencerminkan adanya mismatch antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, yang merupakan salah satu tantangan besar dalam pasar tenaga kerja saat ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019 persen	Agustus 2020 persen	Agustus 2021 persen	Agustus 2022 persen	Agustus 2023 persen	Agustus 2024 persen	Perubahan Ags 2023-Ags 2024 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60	-0,29



Tabel Tingkat pengangguran terbuka Kurva diatas menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Dari grafik tersebut, dapat diamati bahwa sebelum pandemi, tingkat pengangguran relatif stabil di angka 5,39% pada 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis menjadi 6,91%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Krisis kesehatan ini berdampak besar pada sektor ekonomi, dengan banyak bisnis yang harus mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup usahanya. Dampak dari kondisi ini terlihat dalam data statistik, di mana banyak negara mengalami lonjakan pengangguran akibat terganggunya rantai pasok, kebijakan pembatasan sosial, dan ketidakpastian ekonomi.

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran menurun menjadi 6,33%, yang menandakan mulai adanya pemulihan ekonomi. Seiring dengan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, seperti insentif untuk usaha kecil, peningkatan investasi, serta transisi ke ekonomi digital, jumlah pengangguran secara bertahap berkurang. Pada tahun 2022 dan 2023, tingkat pengangguran terus menunjukkan tren penurunan, mencapai 6,16% dan 5,89%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024, dengan TPT turun lagi menjadi 5,60%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi telah cukup efektif dalam mengembalikan kesempatan kerja, meskipun tantangan ketenagakerjaan masih tetap ada.

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,60%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,89%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan dan ekonomi secara keseluruhan. Tren ini melanjutkan pola pemulihan yang terjadi sejak 2021, setelah puncak pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingkat pengangguran mengalami penurunan pada tahun ini.

Salah satu faktor utama adalah pemulihan ekonomi yang semakin stabil setelah dampak besar dari pandemi COVID-19. Sejak beberapa tahun terakhir, ekonomi global dan nasional mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif, didorong oleh meningkatnya aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat. Banyak perusahaan yang sebelumnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai kembali merekrut tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak pandemi, seperti perhotelan, transportasi, dan perdagangan. Seiring dengan pemulihan ini, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, sehingga angka pengangguran pun berangsur turun.

Selain itu, investasi yang meningkat dan pertumbuhan sektor industri turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sektor manufaktur, teknologi, dan infrastruktur mengalami perkembangan pesat, membuka banyak peluang bagi tenaga kerja. Pemerintah juga mendorong investasi asing maupun domestik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin banyak perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Di sektor teknologi, digitalisasi semakin berkembang, yang tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru tetapi juga membuka peluang kerja fleksibel berbasis teknologi, seperti freelancer, e-commerce, dan industri kreatif.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi faktor penting dalam penurunan tingkat pengangguran. Banyak masyarakat yang sebelumnya menganggur mulai beralih ke sektor informal dan menjalankan bisnis sendiri, terutama dengan semakin berkembangnya platform digital yang memudahkan pemasaran produk dan jasa. Pemerintah dan berbagai institusi juga memberikan berbagai bantuan dan pelatihan untuk mendorong UMKM agar berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha dan bisnis kecil, semakin banyak orang yang memiliki sumber penghasilan, sehingga tingkat pengangguran pun semakin berkurang.

Selain sektor ekonomi, program pelatihan tenaga kerja yang lebih intensif juga berperan dalam menurunkan angka pengangguran. Pemerintah dan sektor swasta semakin gencar memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja. Program *upskilling* dan *reskilling* menjadi kunci dalam mengurangi pengangguran, terutama bagi lulusan perguruan tinggi yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan karena ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) juga semakin terserap ke dalam dunia kerja karena memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan permintaan pasar.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung penciptaan lapangan kerja menjadi faktor krusial dalam menurunnya angka pengangguran. Berbagai program, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja baru, subsidi upah bagi pekerja, serta kemudahan regulasi untuk investasi, telah membantu mempercepat proses rekrutmen tenaga kerja di berbagai sektor. Proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah juga menciptakan banyak pekerjaan baru, terutama di sektor konstruksi dan industri pendukungnya.

Secara keseluruhan, penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2024 disebabkan oleh kombinasi dari pemulihan ekonomi yang semakin stabil, peningkatan investasi dan pertumbuhan industri, perkembangan ekonomi digital dan UMKM, program pelatihan tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja ini sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu, strategi berkelanjutan dalam menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja tetap menjadi kunci dalam menjaga tren positif ini di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulannya, statistik memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka. Dengan menggunakan metode statistik, pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya dibandingkan dengan total angkatan kerja. Melalui data yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi serta meningkatnya peluang kerja di berbagai sektor.

Penurunan angka pengangguran ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai upaya, terutama dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti peningkatan investasi, program pelatihan tenaga kerja, serta dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, digitalisasi dan inovasi di berbagai industri juga membuka peluang baru bagi tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Meskipun tren penurunan pengangguran menunjukkan hasil yang positif, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar momentum penurunan pengangguran ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan ekonomi nasional semakin stabil.

Saran

Sebagai saran, diharapkan pemerintah terus berupaya untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan berbagai cara yang efektif dan efisien, guna mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri, serta memperluas program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital dan wirausaha, karena sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Dukungan terhadap UMKM harus terus diperkuat melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan bisnis, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan meningkatnya jumlah wirausahawan, ketergantungan terhadap sektor formal dalam mencari pekerjaan dapat berkurang, sehingga angka pengangguran bisa semakin ditekan.

Peningkatan investasi juga menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan regulasi bagi investor agar semakin banyak sektor industri yang berkembang. Dengan pertumbuhan investasi yang pesat, lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka bagi Masyarakat Lebih jauh, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus semakin diperkuat agar tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Jika seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menekan angka pengangguran, maka cita-cita Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul pada tahun 2045 dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara 2023*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2023*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Analisis Ketenagakerjaan di Sektor Pertanian dan Pariwisata di Sumatera Utara*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Demografi Provinsi Sumatera Utara 2023*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi Regional Sumatera Utara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan Kewirausahaan di Sumatera Utara*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah 2023*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Evaluasi Program Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara 2023*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.